



EKTIVITAS DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEMANDIRIAN FISKAL PROVINSI ACEH

Suci Rahayu

Universitas Syiah Kuala

Corresponding Author

sucirahayu009@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of fiscal dependency in Aceh highlights challenges in managing the Special Autonomy Fund. This study aims to evaluate the extent to which the Special Autonomy Fund contributes to economic development and fiscal independence in Aceh Province. The Systematic Literature Review (SLR) method was applied, analyzing 15 research articles from 2017 to 2025. The analysis results indicate that the majority of the studies found an insignificant, or even negative, effect of the Special Autonomy Fund on economic growth and the level of regional fiscal independence. The use of these funds tends to be more for consumptive spending, which produces a flypaper effect and creates dependence on the central government. However, several studies also identified a positive impact of the Special Autonomy Fund in enhancing the role of zakat and supporting welfare through education and community economic empowerment. Overall, the effectiveness of the Special Autonomy Fund remains relatively low and requires policy improvements based on performance, transparency, and the distribution of funds to more productive sectors to strengthen Aceh's long-term fiscal independence.*

Keywords: *Special Autonomy, Special Autonomy Fund, Economic Development, Fiscal Independence, Flypaper Effect.*

Abstrak. *Fenomena ketergantungan fiskal di Aceh menunjukkan tantangan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana DOK berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kemandirian fiskal di Provinsi Aceh. Metode yang diterapkan adalah Systematic Literature Riview (SLR) dengan menganalisis 15 artikel penelitian dari tahun 2017 hingga 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menemukan pengaruh DOK yang tidak signifikan, bahkan dapat dikatakan negatif, terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemandirian fiskal daerah. Penggunaan dana ini cenderung lebih pada belanja konsumtif yang menghasilkan efek flypaper dan menciptakan ketergantungan pada pusat. Meskipun demikian, beberapa penelitian juga mengidentifikasi dampak positif DOK dalam meningkatkan peran zakat serta mendukung kesejahteraan melalui pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, efektivitas DOK masih tergolong rendah dan membutuhkan perbaikan kebijakan yang berbasis pada kinerja, keterbukaan, serta penyaluran dana ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk memperkuat kemandirian fiskal Aceh dalam jangka panjang.*

Katakunci: *Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Pembangunan Ekonomi, Kemandirian Fiskal, Flypaper Effect*

1. Pendahuluan

Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh adalah salah satu bentuk pelaksanaan desentralisasi asimetris di Indonesia, yang memiliki karakter dan dasar



hukum yang berbeda dari daerah lainnya. Kebijakan ini dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang merupakan lanjutan dari perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 (Sanur, 2020).

Dalam kerangka otonomi khusus, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan lokal secara mandiri, termasuk memperoleh Dana Otonomi Khusus (DOK) yang telah disalurkan sejak tahun 2008. Sesuai dengan Pasal 183 ayat (2) UUPA, DOK akan diberikan selama dua dekade, dengan jumlah sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional hingga tahun 2022, dan 1% hingga tahun 2027 (Sanur, 2020). Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Dana Otonomi Khusus merupakan sumber pendapatan Pemerintah Aceh yang diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan, infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta dukungan untuk sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan (Muliadi & Amri, 2019).

Pada dasarnya, pemberian Dana Otonomi Khusus membantu daerah-daerah dengan status ekonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain (Nurlina & Safira, 2019). Namun, kekhawatiran yang timbul adalah adanya ketergantungan yang besar terhadap dana perimbangan, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran daerah (Machfud et al., 2020). Di satu sisi, otonomi khusus telah memberikan peluang besar bagi pemerintah Aceh untuk mendorong pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain, ada berbagai kritik mengenai besarnya ketergantungan fiskal terhadap dana dari pusat dan belum optimalnya penggunaan dana untuk kegiatan yang produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, menunjukkan angka kemiskinan Provinsi Aceh sebesar 12,64% pada September 2024 dan 12,33% pada Maret 2025. Angka ini masih menempatkan Aceh di peringkat satu daerah termiskin di Pulau Sumatera. Seharusnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemandirian sesuai dengan hukum yang berlaku (Zulkarnaini et al., 2024).

Untuk memahami efektivitas otonomi khusus, teori desentralisasi fiskal oleh Oates (1972), pemindahan otoritas fiskal dari pusat ke daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya publik dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah dengan mendekati pemerintah kepada kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, teori ini hanya dapat berfungsi dengan baik jika daerah memiliki manajemen keuangan yang baik, tingkat akuntabilitas yang tinggi, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Dalam hal ini, tantangan tersebut masih tampak jelas di Aceh, di mana sejumlah bukti empiris menunjukkan bahwa dana otonomi khusus sering kali tidak diarahkan dengan tepat dan lebih bersifat konsumtif daripada produktif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan otonomi khusus di Aceh masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pengelolaan dana yang cenderung konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian fiskal. Meskipun kebijakan ini telah membuka peluang bagi percepatan pembangunan ekonomi, ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Dana



Otonomi Khusus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kemandirian fiskal di Provinsi Aceh, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan pasca berakhirnya periode otonomi khusus.

2. Tinjauan Pustaka

No.	Nama Penulis	Judul Artikel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Hezron Paul Marpaung, Puti Andiny, Safuridar, Dan Yani Rizal (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pdrb Di Provinsi Aceh	Kuantitatif	Variabel Dana Otonomi Khusus (DOK) Menunjukkan Dampak Negatif Terhadap PDRB Dengan Koefisien - 0,006146 Dan Nilai Probabilitas 0,0095. Karena Nilai Probabilitas Di Bawah 0.05, Dapat Disimpulkan Bahwa Setiap Kenaikan 1% Pada DOK Mengurangi PDRB Sebanyak 0,006146 Unit, Variable Lain Tetap. Ini Menunjukkan Bahwa Pengelolaan DOK Masih Belum Efektif Dan Dapat Menghambat Pertumbuhan Ekonomi.
2.	Hasta Budiratna Dan Riatu M. Qibthiyah (2020)	Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papua Barat	Kuantitatif	Penerimaan Daerah Dari Dana Otonomi Khusus Tidak Berdampak Signifikan Pada Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Aceh. Hal Ini Mungkin Disebabkan Oleh Faktor-Faktor Seperti Kebijakan Regulasi Dan Pengelolaan Anggaran. Regulasi Yang Ada Tidak Menunjukkan Persentase Alokasi Yang Jelas Untuk Program Pengurangan Kemiskinan Dalam Undang-Undang Atau Qanun Di Aceh. Akibatnya, Pemanfaatan Dana Otsus Untuk Menangani Kemiskinan Hanya Mencapai Sekitar 2-3%.
3.	Nanda Herijal Putra Dan	Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus	Kajian Pustaka	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa



	Amran (2023)	Di Aceh		Otonomi Khusus Memberikan Aceh Dana Besar Untuk Investasi Infrastruktur Publik. Tujuan Utamanya Adalah Meningkatkan Ekonomi Daerah Dan Daya Beli Masyarakat, Berharap Bisa Berdampak Positif Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Namun, Pengelolaan Dana Ini Masih Menghadapi Tantangan. Pembagian Anggaran Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Belum Optimal, Pengelolaan Anggaran Perlu Perbaikan, Dan Dampak Pada Kesejahteraan Dan Pengurangan Kemiskinan Belum Terlihat Signifikan.
4.	Muliadi Dan Khairul Amri (2019)	Penerimaan Zakat Dan Penurunan Kemiskinan Di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi	Kuantitatif	DOK Sebagai Alat Kebijakan Fiskal Daerah Lebih Efektif Dalam Mengurangi Kemiskinan Dibandingkan Zakat. DOK Tidak Hanya Meramalkan Kemiskinan, Tetapi Juga Mengurangi Dampak Negatif Zakat Terhadapnya. Di Aceh, Penerimaan Zakat Dan DOK Saling Mendukung Secara Positif Untuk Menurunkan Kemiskinan, Memperkuat Peran Zakat Dalam Mengurangi Jumlah Orang Miskin Di Daerah Tersebut.
5.	Muhammad Kadafi Dan Murtala (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-	Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dana Otonomi Khusus Tidak Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Nilai T Hitung Adalah 1,247, Lebih Kecil Dari T Tabel 1,701, Dengan Nilai Signifikan



		2017		0,223 Yang Lebih Besar Dari 0,05. Meskipun Pemerintah Berusaha Mengurangi Kemiskinan Melalui Otonomi Khusus Dan Alokasi Dana, Tidak Ada Pengaruh Karena Penyaluran Dan Penggunaan Dana Tersebut Belum Tepat Sasaran.
6.	Sisca Mediyanti (2019)	Analisis Dampak Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh	Kuantitatif	Penggunaan Dana Otonomi Khusus Oleh Pemerintah Aceh, Baik Untuk Provinsi Maupun Kabupaten/Kota, Belum Membantu Pertumbuhan Ekonomi Dengan Baik. Salah Satu Alasan Utama Adalah Kebijakan Pengalokasian Dana Otsus Yang Tidak Fokus Pada Sektor Ekonomi Yang Bisa Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah.
7.	Farica Yusrina Lubis, Muttaqien, Rico Nur Ilham, Dan Ghazali Syamni (2025)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Sektor Kesehatan Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2020-2023	Kuantitatif	Dana Otonomi Khusus Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Aceh. Meskipun Dana Otonomi Khusus Merupakan Sumber Dana Yang Besar, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Dana Tersebut Lebih Dipakai Untuk Biaya Operasional Atau Program Yang Tidak Langsung Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Ini Mungkin Juga Belum Efektif Dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah.
8.	Amzar Ardiyansyah Dan Nazaruddin	Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Dalam	Kualitatif	Penelitian Menunjukkan Bahwa Pemerintah Aceh Belum Memaksimalkan



	(2024)	Pembangunan Dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat		Wewenangnya Dan Dana Otonomi Khusus Untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat. Sebagian Besar Dana Tersebut Tidak Digunakan Dengan Tepat Untuk Kepentingan Publik. Pemerintah Aceh Dan DPRA Perlu Merumuskan APBA Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat.
9.	Syukriy Abdullah, Endra Gunawan, Dan Syukur Selamat Karo-Karo (2020)	Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal Jaringan Bukti Empiris Dari Aceh	Kuantitatif	Dana Otsus Berpengaruh Pada BMJ Pada Tingkat Kepercayaan 5% Karena Beberapa Alasan. Pertama, Terdapat Efek Flypaper, Di Mana Pemerintah Daerah Menggunakan Dana Otsus Untuk Mendanai BMJ Yang Membutuhkan Banyak Anggaran. Kedua, Ada Praktik Pencarian Keuntungan Oleh Pembuat Kebijakan Yang Bekerja Sama Dengan Pihak Ketiga Seperti Kontraktor.
10.	Muhammad Iqbal, Tarmizi Abbas Dan Ratna (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Kuantitatif	Berdasarkan Analisis Yang Dilakukan, OTSUS Memberikan Dampak Positif Yang Signifikan Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Koefisien OTSUS Tercatat Sebesar 0,0897 Yang Berarti Jika ITSUS Naik 1% Belanja Daerah Akan Meningkatkan Sebesar 0,897 Dengan Asumsi PAD, DAU, Dan DAK Tetap. Ini Menunjukkan Bahwa Semakin Tinggi OTSUS, Semakin Besar Pengeluaran Daerah Di Provinsi Aceh.
11.	Ar Rizha Islami (2023)	Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui	Kualitatif	Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Telah Membantu Mengurangi



		Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (Doka) Di Kabupaten Aceh Barat		Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat Dengan Meningkatkan Akses Pendidikan, Kesehatan, Dan Pemberdayaan Ekonomi. Menurut Data BPS, Tingkat Kemiskinan Turun Dari 17,25% Pada 2020 Menjadi 15,68% Pada 2023. Namun, Penelitian Ini Juga Menunjukkan Beberapa Masalah Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Seperti Rendahnya Transparansi Dan Akuntabilitas, Program Yang Tumpang Tindih Antarinstansi, Dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan.
12.	M. Alief Fahrizal Dan Ni Made Sukartini (2024)	Flypaper Effect Dana Otonomi Khusus Dan Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota Di Aceh	Kuantitatif	Flypaper Effect Hanya Terjadi Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal, Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tidak Menunjukkan Gejala Flypaper Effect. Bahkan, Dana Otsus Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal Maupun Belanja Barang Dan Jasa Di Aceh.
13.	T. Zulfan Dan Era Mustika (2018)	Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Fly Paper Effect Di Provinsi Aceh	Kuantitatif	Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Variabel OTSUS Memberikan Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Pengeluaran Daerah. Pengaruh OTSUS Lebih Besar Dibandingkan PAD Dalam Hal Belanja Daerah. Kemampuan Fiskal Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Belanja Bersumber Dari Pemerintah



				Pusat, Terutama Dari Dana OTSUS. Dampak Besar Dari Dana OTSUS Menunjukkan Adanya Fenomena Efek Fly Paper Dalam Keuangan Daerah Di Provinsi Aceh.
14.	Teuku Zulfan Dan Hafiizh Maulana (2019)	Gejala Fly Paper Effect Di Provinsi Aceh Ditinjau Dari Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus	Kuantitatif	Berdasarkan Hasil Uji Menggunakan Random Effect Model, Dana Otonomi Khusus Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Dan Positif Terhadap Belanja Daerah, Baik Untuk Tahun Berjalan Maupun Untuk Tahun-Tahun Sebelumnya. Peningkatan Ini Mengindikasikan Adanya Flypaper Effect, Sebab Pemasukan Yang Berasal Dari PAD Lebih Sedikit Dibandingkan Dari Dana Transfer.
15.	Machfud, Asnawi, Dan Naz'aina (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	Kuantitatif	Dana Otonomi Khusus Memiliki Dampak Negatif Dan Signifikan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh. Temuan Ini Mengindikasikan Bahwa Ketika OTSUS Berada Pada Tingkat Tinggi, Kemandirian Daerah Akan Mengalami Penurunan. Penelitian Ini Juga Mengungkapkan Bahwa OTSUS Berperan Sebagai Faktor Yang Dapat Mengurangi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Metodologi Penelitian



Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Fokus penelitian ini adalah pada artikel-artikel yang berhubungan dengan Dana Otonomi Khusus Aceh dalam bidang Akuntansi Pemerintahan. Artikel-artikel yang digunakan diperoleh melalui pencarian di Google Scholar, yang merupakan salah satu basis data ilmiah. Proses pencarian dilakukan dengan kombinasi kata kunci “*Otonomi Khusus Aceh*”, “*Dana Otonomi Khusus*”, dan “*Kemandirian Fiskal*”. Untuk menjaga agar hasil yang ditemukan tetap aktual dan relevan, artikel-artikel yang dipilih dibatasi pada periode 8 tahun terakhir, yaitu antara 2017-2025. Berdasarkan relevansi terhadap topik serta kata kunci yang digunakan, sebanyak 15 artikel akan dianalisis lebih lanjut di dalam penelitian ini.

4. Hasil Penelitian

Efektivitas Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Ekonomi

Berbagai penelitian empiris telah dirangkum, pelaksanaan otonomi khusus di Aceh menunjukkan hasil yang beragam dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan kemandirian fiskal. Beberapa hasil menunjukkan, meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan kewenangan daerah dan memberikan peluang untuk kesejahteraan masyarakat, efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus masih menimbulkan perdebatan. Seperti yang dijelaskan oleh Rahman et al., (2024), Otonomi Khusus Aceh bersifat kompleks, di satu sisi menjadi jembatan rekonsiliasi pasca konflik, namun di sisi lain menimbulkan ketegangan baru akibat konflik kepentingan elit lokal, perbedaan interpretasi kewenangan, dan belum teratasinya masalah kesejahteraan. Situasi ini sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya, bahwa dana tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, maupun peningkatan kemandirian fiskal daerah. Bahkan, beberapa studi menemukan adanya pengaruh negatif Dana Otonomi Khusus terhadap PDRB dan rasio kemandirian keuangan daerah, yang menguatkan indikasi terjadinya *flypaper effect* dan tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan peran Dana Otsus dalam memperkuat dampak zakat terhadap penurunan kemiskinan.

Dalam penelitian Marpaung et al., (2024) menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB Aceh yang mengindikasikan bahwa kenaikan DOK justru menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah, artinya pengelolaan dana belum efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi daerah. Dalam hal tantangan tata kelola DOK, meskipun dana dialokasikan besar untuk pembangunan infrastruktur publik, pembagian anggaran antarlevel pemerintahan dan efektivitas implementasinya masih belum optimal sehingga dampak ekonomi dari DOK belum dirasakan secara signifikan oleh Masyarakat (Putra, 2023). Temuan lain juga memperkuat, Mediyanti, (2019) menyatakan bahwa penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Pemerintah Aceh, baik yang dialokasikan untuk provinsi atau kabupaten/kota, belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan yang diambil dalam pengalokasian dana tidak terarah pada sektor-sektor ekonomi yang produktif.



Pembangunan ekonomi yang berhasil diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa DOK belum sepenuhnya memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. DOK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Aceh karena lemahnya regulasi dan tidak adanya alokasi anggaran yang jelas untuk program ini sehingga pemanfaatannya hanya berkontribusi sekitar 2-3% terhadap penurunan kemiskinan (Qibthiyyah, 2020). Selanjutnya Kadafi & Murtala, (2020) memperkuat pandangan lain dengan temuan bahwa DOK tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh selama tahun 2010-2017, karena pemanfaatan dan distribusinya belum sesuai sasaran.

Namun, dalam penelitian Muliadi & Amri, (2019) menemukan sisi positif, bahwa DOK memperkuat peran zakat dalam menurunkan kemiskinan di Aceh, menunjukkan efek moderasi positif antara penerimaan zakat dan DOK terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa DOK memperkuat peranan penerimaan zakat dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin di wilayah tersebut. Lebih lanjut, sebuah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat oleh Islami, (2019) menunjukkan bahwa DOK Aceh telah berkontribusi nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan terutama melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari segi belanja daerah, juga memiliki peranan penting untuk kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan melalui investasi publik, infrastruktur, dan layanan sosial. DOK di Aceh berpengaruh pada belanja daerah untuk pembangunan. Dengan dana lebih besar, kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan program ekonomi juga meningkat. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Abdullah et al., (2020) menemukan bahwa DOK memiliki dampak terhadap Belanja Modal Jaringan (BMJ) meskipun terdapat beberapa indikasi yaitu adanya *flypaper effect* di mana pemerintah daerah mengusulkan DOK untuk mendanai BMJ yang mahal. Selain itu, juga terdapat indikasi *rent seeking* oleh pejabat daerah dalam pengelolaan anggaran. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Iqbal et al., (2020) yang menunjukkan bahwa DOK memiliki dampak positif dan signifikan pada belanja daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kenaikan DOK sebesar 1% meningkatkan belanja daerah sebesar 0,0897%, artinya semakin tinggi DOK, semakin besar pula belanja daerah. Keberhasilan DOK untuk pembangunan ekonomi di Aceh bergantung pada pengelolaan yang baik, perencanaan anggaran, dan kemampuan pemerintah daerah menyalurkan anggaran publik. Ini harus dilakukan pada bidang-bidang yang memberikan nilai tambah besar dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Efektivitas Dana Otonomi Khusus terhadap Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai pembangunan dan menjalankan fungsi pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung pada dana dari pusat. Di Aceh, DOK diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan pendapatan daerah. Namun, jika tidak digunakan dengan produktif, bisa menyebabkan ketergantungan fiskal yang tinggi dan menurunkan kemandirian daerah.



Berdasarkan beberapa hasil penelitian, pengaruh DOK terhadap tingkat kemandirian fiskal di Aceh menunjukkan kecenderungan yang negatif. Penelitian oleh Machfud et al., (2020) mengungkapkan bahwa DOK berdampak negatif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Saat alokasi DOK bertambah, rasio kemandirian fiskal daerah cenderung berkurang. Temuan ini menegaskan bahwa ketergantungan pada dana dari pusat masih sangat tinggi, sementara kemampuan fiskal daerah belum berkembang secara maksimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh F. Y. Lubis et al., (2025) yang menyebutkan bahwa DOK tidak memberikan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan daerah, terutama terkait rasio kemandirian, karena sebagian besar dana dialokasikan untuk pengeluaran operasional dan program jangka pendek yang tidak berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Fenomena *flypaper effect* juga disorot dalam hal ini. *Flypaper effect* adalah fenomena di mana transfer dari pemerintah pusat lebih mendorong peningkatan belanja daerah dibandingkan PAD sendiri. Dengan kata lain, dana yang diterima dari pusat sering kali langsung digunakan untuk belanja pemerintah daerah, bukannya untuk memperkuat sumber pendapatan lokal. Di Aceh, fenomena ini menjadi masalah karena daerah sangat bergantung pada DOK. Jika ini terus berlanjut, tujuan otonomi khusus untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan kemampuan ekonomi daerah akan sulit tercapai.

Zulfan & Mustika, (2018) menemukan bahwa Dana Otsus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, bahkan lebih besar dibandingkan PAD, sehingga memperkuat indikasi bahwa keuangan daerah Aceh sangat bergantung pada transfer pusat. Hal senada disampaikan oleh Zulfan & Maulana, (2019), di mana DOK menunjukkan pengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik di tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, yang mengonfirmasi keberadaan *flypaper effect* di Aceh. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahrizal & Sukartini, (2024) yang mengungkapkan bahwa DOK tidak memiliki dampak yang berarti terhadap belanja modal maupun belanja barang dan jasa, sehingga *flypaper effect* lebih dominan pada Dana Alokasi Umum (DAU).

Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DOK belum memberikan dampak optimal terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Pemerintah Aceh belum memanfaatkan sepenuhnya kewenangan otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena sebagian besar alokasi dana belum diarahkan secara tepat sasaran dan kurang menyentuh kepentingan publik (Ardiyansyah & Nazaruddin, 2024). Fenomena *flypaper effect* yang ditemukan dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat tidak selalu berdampak positif tetapi bisa memperkuat ketergantungan fiskal. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan pengelolaan DOK sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Aceh dalam jangka panjang. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan.

1. Reorientasi alokasi DOKA menuju investasi produktif



Penentuan jumlah minimum dari DOK untuk kegiatan yang produktif seperti Pendidikan vokasi, Kesehatan, pengembangan UMKM, dan ekonomi hijau akan memastikan dana ini berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan dan Pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Langkah ini sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan keberhasilan desentralisasi fiskal ditentukan oleh arah pengeluaran daerah yang produktif.

2. Skema transfer berbasis kinerja (performance-based transfers)

Sebagian dana yang dialokasikan dapat berhubungan dengan pencapaian indikator kinerja seperti peningkatan PAD, pengurangan kemiskinan, atau peningkatan belanja produktif. Ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran dan mengurangi ketergantungan pada pusat. Sistem ini dapat membantu menuju kemandirian fiskal yang lebih baik jika DOKA berakhir atau berubah.

3. Penguatan akuntabilitas dan transparansi

Implementasi sistem e-budgeting dan audit independen rutin akan meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi risiko kebocoran anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan adalah salah satu alasan rendahnya efektivitas DOK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan data dan partisipasi publik dalam pengawasan sangat penting bagi keberlanjutan kebijakan ini.

4. Penguatan kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi PAD

Melalui pelatihan teknis, reformasi peraturan daerah, dan pengelolaan aset BUMD yang lebih efektif. Langkah ini menjadi komponen penting dalam strategi mencapai kemandirian fiskal di daerah.

5. Penyesuaian aspek hukum dan kelembagaan

Perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh agar dapat menjadi dasar hukum bagi perpanjangan atau reformulasi mekanisme DOKA, serta mendorong pembentukan skema kompensasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas APBA (A. S. Lubis et al., 2025).

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dampak DOK terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh masih tergolong rendah. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa dana ini belum mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tidak memiliki pengaruh yang jelas terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya kebijakan distribusi dana yang lebih banyak dialokasikan untuk belanja konsumsi dan kegiatan operasional, lemahnya manajemen serta pengawasan anggaran, dan kurangnya perhatian pada sektor produktif seperti UMKM, pendidikan keterampilan, serta ekonomi yang berbasis sumber daya lokal. Meskipun demikian, beberapa penelitian menemukan adanya kontribusi positif DOK ketika digabungkan dengan instrumen lain seperti zakat, yang terbukti menambah efektivitas upaya pengentasan kemiskinan di sejumlah wilayah.

Dari segi kemandirian fiskal, DOK justru cenderung menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Banyak penelitian menunjukkan adanya *flypaper effect*, di



mana transfer dana dari pusat lebih berpotensi meningkatkan belanja daerah daripada PAD. Hal ini menunjukkan bahwa DOK belum berhasil memperkuat pendapatan lokal Aceh, melainkan mengurangi insentif daerah untuk mengembangkan kapasitas fiskalnya sendiri. Sebagai akibatnya, setelah periode otonomi khusus berakhir, risiko ketidakstabilan fiskal dan penurunan kemampuan pembangunan daerah akan sangat tinggi.

Namun, kebijakan otonomi khusus tetap menyimpan potensi besar sebagai alat desentralisasi fiskal yang bisa mempercepat pembangunan daerah. Potensi ini hanya dapat terwujud melalui reformulasi kebijakan pengelolaan DOK dengan pendekatan yang mengedepankan alokasi pada sektor produktif, penerapan sistem transfer berdasarkan kinerja, penguatan akuntabilitas dan transparansi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta pembaruan regulasi institusi. Dengan cara ini, DOK dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal Aceh di masa mendatang.

6. Referensi

- Abdullah, S., Gunawan, E., & Selamat Karo-Karo, S. (2020). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal Jaringan Bukti Empiris dari Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4(1), 25–38.
- Ardiyansyah, A., & Nazaruddin, N. (2024). Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2678>
- Fahrizal, M. A., & Sukartini, N. M. (2024). Flypaper Effect Dana Otonomi Khusus Dan Dana Perimbangan Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1203–1214. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4058>
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 5(3), 1–13. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i3.1536>
- Islami, A. R. (N.D.). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (Doka) Di Kabupaten Aceh Barat Ar*. 1–9.
- Kadafi, M., & Murtala. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(10), 302–317.
- Lubis, A. S., Yusuf, M. R., & Arysandi, D. N. (2025). Desentralisasi Fiskal Asimetris : Tinjauan terhadap Relasi Kemandirian Fiskal dengan Keberlanjutan Otsus Aceh. *Jurnal Negara Hukum*, 16, 49–72. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.148.Rahmat>
- Lubis, F. Y., Muttaqien, Ilham, R. N., & Syamni, G. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Sektor Kesehatan Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2020-2023. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2), 11010–11018.



- <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Machfud, Asnawi, & Naz'aina. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-Mind)*, 5(1), 14–31.
- Marpaung, H., Andiny, P., Safuridar, S., & Rizal, Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pdrb Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 184–197. <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.184>
- Mediyanti, S. (2019). Analisis Dampak Realisasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 7, 56–60.
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan Zakat dan Penurunan Kemiskinan di Aceh: Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 231. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706>
- Nurlina, & Safira, S. (2019). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(1), 126–138. <https://doi.org/10.35724/feb.v3i1.3793>
- Putra, N. H. dan A. (2023). Dinamika Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(otonomi khusus), 192–213. <http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2011/ressoestec/art2000.pdf>
- Qibthiyyah, H. B. dan R. M. (2020). Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus Di Aceh, Papua, Dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(3), 494. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>
- Rahman, D. A., Bakar, A., Rizwan, M., Hidayat, B., & Muntasir. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Volume 9 No.*, 9(3), 183–194.
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Zulfan, T., & Maulana, H. (2019). Gejala Fly Paper Effect Di Provinsi Aceh Ditinjau dari Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. *Inovasi*, 15(2), 188–197.
- Zulfan, T., & Mustika, E. (2018). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Fly paper effect di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.35870/emt.v2i1.50>
- Zulkarnaini, Z., Islahuddin, I., Abdullah, S., & Fahira, A. (2024). Systematic Literature Review: Menilik Multi Aspek Implementasi Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(4), 4353–4368. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2412>